

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembangunan Manusia

Investasi sumber daya manusia akan membentuk modal manusia (*human capital*) yang akan memberikan imbalan berupa penghasilan yang lebih besar di masa mendatang. Dalam investasi di bidang sumber daya manusia yang dikorbankan adalah sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi, sedangkan yang diperoleh sebagai imbalannya adalah tingkat penghasilan lebih tinggi untuk mampu mencapai kenaikan pada pengeluaran. Investasi yang demikian dinamakan *human capital*. Penerapannya dapat dilakukan dalam (1) pendidikan dan latihan, (2) migrasi, dan (3) perbaikan gizi dan kesehatan. (Simanjuntak dalam Saputri, 2014)

Keberhasilan pembangunan suatu daerah khususnya pembangunan manusia atau masyarakat dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan tersebut diantaranya pengangguran dan kemiskinan. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal.

yang selanjutnya muncul pertanyaan mengenai penilaian keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2015), indeks pembangunan manusia atau yang biasa disingkat dengan IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks pembangunan manusia dibentuk atas tiga dimensi dasar yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang luas karena terkait dengan banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan kemampuan daya beli (*purchasing power of parity*).

Indeks pembangunan manusia dapat mengetahui kondisi pembangunan di suatu daerah dengan alasan; *pertama*, indeks pembangunan manusia menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia. *Kedua*, indeks pembangunan manusia menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. *Ketiga*, IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat. *Keempat*, meskipun dapat menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia, tetapi indeks pembangunan manusia belum tentu mencerminkan kondisi yang sesungguhnya,

namun untuk saat ini merupakan satu-satunya indikator untuk pemngukur pembangunan kualitas hidup manusia.

Sebelum dilakukan penghitungan indeks pembangunan manusia, setiap komponen dalam indeks pembangunan manusia harus dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan formula sebagai berikut (BPS, 2015) :

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

$X_{(i,j)}$: Indeks komponene ke- i dari daerah j

$X_{(i-\min)}$: nilai minimum dari X_i

$X_{(i-\max)}$: nilai maksimum dari X_i

TABEL 2.1.

Nilai Maksimum dan Minimum Perhitungan Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Sumber : BPS (2015)

Keterangan :

- 1) Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara Papua

- 2) Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi yang diproyeksi hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan Tahun 2025

Pengukuran indeks pembangunan manusia berdasarkan pada tiga indeks, antara lain; indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indeks Harapan Hidup

Pada indeks harapan hidup, terdapat komponen indeks pembangunna manusia yaitu angka harapan hidup. Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussel dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston dalam BPS, 2015). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup. Secara matematis angka harapan hidup dapat dihitung sebagai berikut (BPS, 2015):

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}} \dots\dots\dots(2)$$

b. Indeks Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan

adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). (BPS, 2015)

Berikut ini adalah perhitungan indeks Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan indeks Pendidikan (BPS, 2015):

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}} \dots\dots\dots(3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}} \dots\dots\dots(4)$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \dots\dots\dots(5)$$

c. Indeks Pengeluaran

Komponen indeks pembangunan manusia dalam indeks pengeluaran adalah pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*). Berikut adalah perhitungannya (BPS, 2015):

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m} \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan:

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j

P_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

P_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : jumlah komoditas

sedangkan untuk menghitung Indeks Pengeluaran adalah sebagai berikut (BPS, 2015):

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})} \dots\dots\dots(7)$$

2. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia

Setelah diketahui nilai dari komponen-komponen IPM yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Maka nilai IPM dapat dihitung melalui formula berikut (BPS, 2015):

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \dots\dots\dots(8)$$

Menurut BPS (2015) capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

- 1) Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
- 2) Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
- 3) Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
- 4) Kelompok “rendah” : $IPM < 60$

Untuk mengukur kecepatan perembangan IPM dala suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai perubahan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(9)$$

Keterangan :

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

3. Pengeluaran Pemerintah

Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai

kegiatan-kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. (Sukirno, 2004)

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu :

1) Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.

2) Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat.

Menurut Dumairy (1999) Pemerintah memiliki 4 peran yaitu :

- 1) Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
- 2) Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar
- 3) Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium.
- 4) Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Empat jenis utama dari pengeluaran publik dinegara maju antara lain: pendidikan, infrastruktur, jaminan sosial dan kesejahteraan, dan perawatan kesehatan. Empat bidang tersebut dipilih berdasarkan lima kriteria: 1. Mewakili komponen utama pengeluaran 2. Melibatkan peran pemerintah pusat maupun daerah 3. Memberikan pengaruh pada sejumlah besar rumah tangga atau masyarakat 4. Menunjukkan tantangan kebijakan yang penting 5. Bidang-bidang tersebut telah berada dalam agenda kebijakan publik selama dua dekade terakhir.

Menurut Sukirno (2004) penentu-penentu pengeluaran pemerintah diantaranya :

- 1) Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Semakin banyak jumlah

pajak yang dapat dikumpulkan, semakin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan

2) Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, misalnya pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur dan mengembangkan pendidikan.

3) Pertimbangan politik dan keamanan

Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai negara di dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kestabilan dari negara luar juga dapat menimbulkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran ketentaraan dan akan memaksa pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak.

a. Teori Pengeluaran Pemerintah

1) Adolph Wagner

Penelitian empiris oleh Adolph Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Ekonom Jerman ini mengukurnya dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Temuannya kemudian oleh Richard A. Musgrave dinamakan “hukum

pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat” (law of growing public expenditures). Wagner sendiri menamakannya “hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat” (law of ever increasing state activity).

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab tersebut adalah : (Dumairy, 1999)

- a) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan
 - b) Kenaikan Tingkat pendapatan masyarakat
 - c) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi
 - d) Perkembangan demokrasi
 - e) Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.
- 2) Teori Rostow dan Musgrave

WW Rostow dan RA Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahan-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total-rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional – relatif besar. Hal itu disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntuk

pemerintah untuk turun tangan mengatasinya (Mangkoesoebroto dalam Winarti, 2014)

3) Teori Peacock Wiseman

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis “dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah”. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar. Mengacu pada teori pemungutan suara (voting), mereka berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yakni suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara tidak semena-mena atau sewenang-wenang.

Menurut Peacocok-Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat, yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi

dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal tadi terganggu, karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*).

Jika pada saat terjadinya gangguan sosial dalam perekonomian timbul efek penggantian, maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah efek lain yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Efek ini menyatakan bahwa gangguan sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah sesudah redanya gangguan sosial tersebut. Kesadaran semacam itu menggugah kesediaan masyarakat untuk membayar pajak lebih besar, sehingga memungkinkan pemerintah beroleh penerimaan yang lebih besar pula. Inilah yang dimaksudkan dengan analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah (Mangkoesebroto dalam Winarti, 2014)

4. PDRB dan PDRB per kapita

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataanya. Dalam usaha pembangunan nasional yang berkelanjutan dan tepat sasaran dilakukan perencanaan pembangunan yang baik

dan didukung oleh sarana dan prasarana perekonomian suatu wilayah. Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan nasional atau regional.

Untuk menghitung angka-angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015) :

a. Pendekatan produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu daerah dalam waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha yaitu : pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; penyediaan akomodasi listrik dan gas; pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya.

b. Pendekatan pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya belum dipotong pajak penghasilan dan [ajak langsung lainnya. PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi).

c. Pendekatan pengeluaran

PDRB adalah komponen permintaan terakhir yang terdiri dari :

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- 2) Konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto
- 4) Perubahan stok
- 5) Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor)

Secara konsep ketiga pendapatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak ta langsung neto

PDRB dapat diartikan dalam tiga pengertian, yaitu :

- 1) Menurut pengertian produksi, PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)
- 2) Menurut pengertian pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)
- 3) Menurut pengertian pengeluaran, PDRB adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor neto

Sedangkan PDRB per kapita sendiri merupakan hasil dari pembagian antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu. PDRB per kapita ini berfungsi untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. Perhitungan PDRB dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$R_t = \frac{Y_t}{X_t} \dots\dots\dots(10)$$

Keterangan :

R_t : PDRB per kapita

Y_t : PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t

X_t : jumlah penduduk tahun ke t

5. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pendidikan sebagai investasi berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan pembangunan sektor lainnya. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan. Negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan yang tinggi secara konsisten menunjukkan tingkat inovasi yang lebih rendah, rendahnya tingkat efisiensi produksi, dan kecenderungan untuk mentransmisi kemiskinan lintas generasi (World Bank dalam Winarti, 2014)

Isu mengenai sumber daya manusia sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara dengan memebrikan dua faktor yaitu: pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia (Khusaini dalam Syam, 2014). Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan di suatu wilayah (Bastian dalam Syam, 2014)

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup

bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut (Meier, et al dalam Winarti, 2014)

6. Hubungan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan indeks pembangunan manusia

Becker dalam Saputri (2014) menyatakan bahwa salah satu cara untuk berinvestasi dalam *human capital* adalah dengan meningkatkan kesehatan emosional dan fisik. Di negara-negara barat, pendapatan lebih dipengaruhi oleh pengetahuan daripada kekuatan saat ini, namun pada masa lampau dan sampai sekarang, kekuatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan apalagi kesehatan emosional dipertimbangkan sebagai faktor penting dalam menentukan pendapatan di seluruh dunia.

Semakin banyak pemerintah mengeluarkan dana pada sektor kesehatan, maka kemungkinan besar masyarakat akan hidup sehat. Dalam indeks pembangunan manusia juga terdapat indeks kesehatan yang di dalamnya terdapat angka harapan hidup, dimana orang yang memiliki kesehatan yang baik akan memiliki umur panjang yang kemungkinan besar juga dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. (Arifin, 2015)

Permasalahan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori *human capital* bahwa modal manusia berpengaruh signifikan, bahkan lebih penting dari faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Setiawan dalam Suparno, 2015).

Dengan demikian kesehatan turut serta membantu peningkatan pembangunan manusia, karena manusia yang sehat akan jauh lebih baik daripada manusia yang kurang sehat. Kesehatan yang baik akan berpengaruh pada perubahan yang baik, sebaliknya kesehatan yang buruk akan nurang baik akan berakibat pada perubahan ke aranh yang kurang baik pula. karena tanpa kesehatan masyarakat tidak akan memiliki semangat serta produktifitas.

7. Hubungan pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita) dan Indeks pembangunan manusia

Pertumbuhan ekonomi memengaruhi pembangunan manusia melalui aktivitas rumah tangga dan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi memengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, sehingga pengeluaran terhadap pemenuhan kebutuhan dasar semakin meningkat. Kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan sanitasi inilah yang meningkatkan kualitas modal manusia. Secara makro, alokasi sumberdaya untuk meningkatkan pembangunan manusia merupakan fungsi dari tiga hal, yaitu total pengeluaran untuk sektor publik, jumlah dana yang dialokasikan untuk sektor-sektor pembangunan manusia, dan bagaimana dana tersebut dialokasikan dalam sektor-sektor tersebut.

Ferroni dan Ravi (1990) menjelaskan hubungan antara pengalokasian sumberdaya, pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Sumberdaya bisa dialokasikan melalui dua cara untuk mencapai pembangunan manusia maupun pertumbuhan ekonomi. Pertama, sumberdaya dialokasikan melalui pengeluaran langsung untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang

selanjutnya akan meningkatkan modal manusia dan kemudian mendorong pertumbuhan produksi serta pembangunan ekonomi. Kedua, dengan mengalokasikan sumberdaya untuk investasi fisik yang kemudian akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan mendorong pembangunan manusia melalui pendapatan yang tinggi. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam menentukan pilihan kebijakan pembangunan berperan penting dalam proses pembangunan dan kemajuan wilayah.

B. Penelitian Terdahulu

Septiana Sanggelorang, dkk (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara” menggunakan tiga variabel yaitu Indeks Pembangunan Manusia, pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah daerah di bidang kesehatan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara, sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berdampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara.

Charisma Kuriata Ginting S, dkk (2008) melakukan penelitian yang berjudul “Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda dengan metode GLS (*General Least Square*). Dengan menggunakan beberapa variabel yaitu Indeks Pembangunan Manusia, pengeluaran konsumsi

rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan, rasio penduduk miskin, dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Dari penelitian dihasilkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh negatif, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan berpengaruh positif, rasio penduduk miskin berpengaruh negatif, dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia.

Astri Winarti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012” menggunakan empat variabel yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, tingkat kemiskinan dan PDB. Penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Dihasilkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, Variabel PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Indonesia.

Denni Sulistio Mirza (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Jenis data yang digunakan adalah data panel periode tahun 2006-2009 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Data Panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif terhadap IPM Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif

terhadap IPM di Jawa Tengah. Dan Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh positif pada IPM di Jawa Tengah.

TABEL 2. 2.
Penelitian Terdahulu

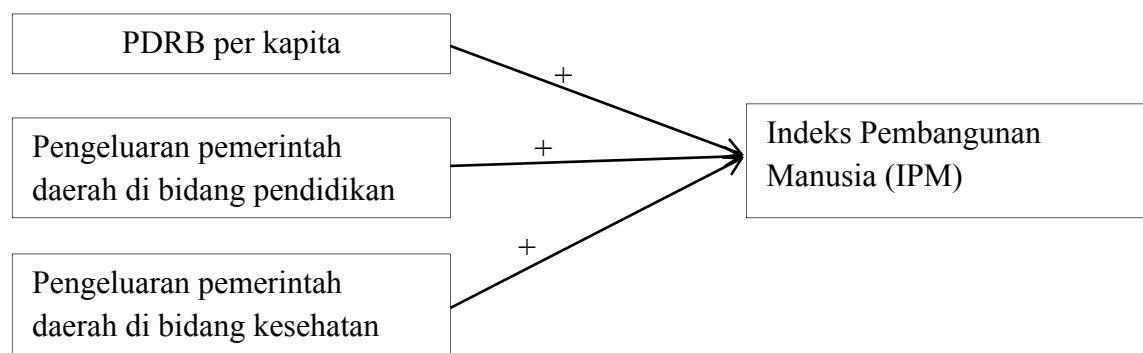
No.	Nama	Judul	Metode Analisis	hasil
1	Septiana Sanggelorang, dkk 2015	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara	Regresi linier berganda	pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berdampak negatif terhadap IPM di Sulawesi Utara.
2	Charisma Kuriata Ginting S, dkk 2008	Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya	Regresi linier berganda	pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh negatif, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bukan makanan berpengaruh positif, rasio penduduk miskin berpengaruh negatif, dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia.

Lanjutan tabel 2. 2...

No.	Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil
3	Astri Winarti 2014	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012	Regresi linier berganda	kemiskinan berpengaruh negatif signifikan, PDB berpengaruh positif signifikan, dan anggaran pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM di Indonesia.
4	Denni Sulistio Mirza 2012	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.	Data panel	Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif terhadap IPM Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap IPM di Jawa Tengah. Dan Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh positif pada IPM di Jawa Tengah.

C. Kerangka Pemikiran

Salah satu hal penting yang perlu dihadapi dalam pembangunan suatu daerah adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dimana kualitas SDM ini tercermin dalam indeks pembangunan manusia. Secara konseptual, pembangunan manusia merupakan upaya untuk meningkatkan capaian penduduk untuk memperoleh hidup layak, melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli serta peningkatan produktifitas melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan. Dari konsep di atas maka seharusnya meningkatnya pendapatan dan pertumbuhan ekonomi serta alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan pada latar belakang permasalahan, tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu maka dapat dimunculkan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menunjukkan hal-hal yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, antara lain :



Gambar 2.1.
Bagan Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dan tinjauan pustaka dapat disusun hipotesis atau dugaan sementara sebagai berikut :

1. Diduga PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di enam kota di Jawa Tengah tahun 2010 – 2015.
2. Diduga pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di enam kota di Jawa Tengah tahun 2010 – 2015.
3. Diduga anggaran pemerintah daerah bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia enam kota di Jawa Tengah tahun 2010 – 2015.